Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan pada Putusan No.2/pid.sus/2014PN.Mdn

Legal Protection for Children Conducting Crimes of Harassment on Decision No.2 / pid.sus / 2014PN.Mdn

Risna Sidabutar & Suhatrizal

Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima: Oktober 2018; Disetujui: November 2018; diterbitkan: Januari 2019

* Email: suhatrizal@staff.uma.ac.id

Abstrak

Perlindungan hukum, bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi, yang dilindungi adalah semua anak tidak terkecuali termasuk anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Adapun tujuan perlindungan adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Tindak pidana merupakan sebuah istilah yang umum digunakan dalam undang-undang Indonesia, dimana istilah tindak pidana lebih menekankan kepada suatu tindakan yang mencakup pengertian melakukan atau berbuat aktif serta tidak berbuat pasif dimana erat kaitannya dengan suatu sikap bati seseorang yang berbuat atau bertindak. Tindakan ataupun perbuatan yang dimaksud mengandung unsur ataupun sifat melawan hukum dari suatu aturan hukum yang telah ada yang melarang tindakan tersebut sehingga tindakan tersebut dapat dijatuhi hukuman.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tindak Pidana

Abstract

Legal protection, for children can be interpreted as an effort to protect the law on various rights and freedoms of children and various interests related to child welfare. So, all children are protected, including children who are dealing with the law (ABH). The purpose of protection is to ensure the full rights of children to live, grow and participate optimally in accordance with human dignity and dignity, and to be protected from violence and discrimination, in order to realize quality Indonesian children who are noble and prosperous. Criminal action is a term commonly used in Indonesian law, where the term criminal act emphasizes an action that includes the meaning of doing or acting actively and not doing passively which is closely related to an attitude of someone who acts or acts. The actions or actions referred to contain elements or unlawful nature of an existing legal rule that prohibits such actions so that these actions can be punished.

Keywords: *Legal Protection, Crime*

How to Cite: Sidabutar, R. & Suhatrizal. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan pada Putusan No.2/pid.sus/2014PN.Mdn. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5 (1): 22-31.

PENDAHULUAN

Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa. Selain itu, anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar kehidupan mereka memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan. (Maidin Gultom 2008).

Persoalan kejahatan kemudian menjadi problem serius yang dihadapi oleh setiap bangsa dan negara didunia ini, karena kejahatan pasti menimbulkan korban. Masalah kejahatan tetap menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat yang kemungkinan munculnya sering kali tidak dapat diduga atau tiba-tiba saja terjadi disuatu lingkungan dan komunitas yang sebelumnya tidak pernah diprediksi akan timbul suatu kejahatan.

Siapa saja dapat menjadi korban kejahatan namun pada umumnya adalah perempuan dan anak karena berdasarkan fisik mereka lebih lemah dari pelaku yang pada umumnya laki-laki. Masyarakat perlu lebih jeli dan peka terhadap lingkungan. Perlu disadari bahwa kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun. Setiap orang dapat menjadi sasaran kejahatan, baik itu orang dewasa maupun anak di bawah umur. Maraknya kejahatan kesusilaan dewasa ini berkenaan dengan biasanya berbentuk pencabulan baik yang dilakukan oleh

sepasang orang dewasa atau sesama orang dewasa maupun sesama anak dibawah umur. Pelaku kejahatan tersebut merasa bahwa anak-anak dibawah umur dapat menjadi salah satu sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Pencabulan yang dilakukan terhadap sesama anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut terutama bagi korban. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut.

Ironisnya kejahatan kesusilaan ini dilakukan oleh anak yang merupakan generasi penerus bangsa di masa datang kelak. Anak merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki peranan strategis yang mempunyai ciri dan sifat khusus, selain itu anak merupakan titipan dari Tuhan yang di berikan kepada orang tua untuk dididik dan dilindungi sebagai penerus bangsa (Undang-Undang NO 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak), Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh yang selaras dan seimbang.

Berdasarkan fenomena yang terjadi diakhir-akhir ini ternyata memperlihatkan perilaku anak yang berada dalam berita-berita di mass media dan televisi di Indonesia perilaku anak banyak yang menjurus kepada tindak pidana kejahatan, seperti pemerkosaan, pencabulan, pencurian, perkelahian antar pelajar dan lain-lain, sehingga anak anak berhadapan dengan proses hukum yang disamakan dengan orang dewasa. Perilaku anak tersebut tidak cukup hanya

dipandang sebagai kenakalan biasa, tidak jarang perbuatan mereka tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati yang menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia.

Perilaku anak yang menyimpang bahkan melanggar hukum cukup kompleks dan beragam. Perilaku yang menunjukkan dekadensi moral manusia telah mereka lakukan. Perilaku menyimpang anak yang sering terjadi adalah penggunaan obat-obatan terlarang dan tindak kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual itu bahkan bukan hanya menimpa perempuan dewasa, namun juga perempuan yang tergolong dibawah umur (anak-anak). Kejahatan seksual ini juga tidak hanya berlangsung dilingkungan perusahaan, perkantoran atau tempat-tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlainan jenis dapat saling berkomunikasi, Namun juga dapat terjadi di lingkungan keluarga. Hal yang lebih memprihatinkan lagi adalah kecenderungan makin maraknya tindak pidana pemerkosaan yang tidak hanya menimpa perempuan dewasa, tetapi juga menimpa anak-anak di bawah umur dan dilakukan oleh anak.

Semakin meningkatnya kriminalitas di Indonesia berakibat timbulnya berbagai macam modus operandi dalam terjadinya tindak pidana. Disamping itu, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana menyebabkan seseorang menjadi korban terjadinya perbuatan pidana, atau seseorang.

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. (Abdul Hakim G. Nusantara 1986).

METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto bahwa Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.

“Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode pencarian asas sesuatu (*inquiry*) secara sistematis dengan adanya penekanan bahwa pencarian ini dimana dilakukan terhadap suatu masalah-masalah yang dapat dipecahkan. Yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya”.

Sedangkan menurut Sutrisno Hadi “penelitian atau *research* adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan usaha mana dilakukan dengan metode-metode ilmiah”.

Salah satunya adalah melalui kegiatan ilmiah, seperti penelitian dimana dalam penelitian tersebut akan mencari data atau bahan-bahan yang dapat dipergunakan untuk penulisan ilmiah. Dimana data adalah merupakan gejala yang akan dicari untuk diteliti, gejala yang diamati oleh peneliti dan hasil pencatatan terhadap gejala yang diamati oleh peneliti”.

Penelitian ini adalah Penelitian Normatif yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan perundang-undangan (hukum positif) dalam rangka mewujudkan keadilan, serta kaitannya dengan Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan (Studi Putusan No.2/Pid.Sus Anak/2014/PN.Mdn). Dengan demikian disamping penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum yang yuridis

normatif akan dipaparkan dalam bentuk dokumenter, yakni membuat detesis mengenai realitas yang dihadapi.

Sifat atau materi penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan ini adalah Deskriptif Analitis yang mengarah penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penelitian hukum yang berdasarkan pada karakteristik atau hukum yang normatif.

Dalam penelitian ini diperoleh melalui data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap bahan kepustakaan. Di dalam penelitian hukum, data sekunder terdiri dari: Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier.

Bersumber dari bahan hukum yang diperoleh langsung dan akan digunakan dalam penelitian ini yang merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Yang merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan-bahan hukum primer, yang terdiri dari: 1) Buku-buku literature; 2) Putusan-putusan pengadilan negeri dan mahkamah agung; 3) Makalah-makalah/laporan penelitian; 4) Artikel-artikel, media massa dan internet.

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Metode Pengumpulan data ada 2 (dua) yaitu metode studi pustaka (*library research*) dan metode studi lapangan (*field research*).

Untuk mengolah data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan, studi dokumen dan

penelitian lapangan di Pengadilan Negeri Medan, maka hasil penelitian menggunakan analisa kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori, sehingga dari teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijalankan kesimpulan dan pembahasan skripsi ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pemeriksaan terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan dalam Proses Peradilan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik selama pemeriksaan pendahuluan untuk mencari bukti-bukti tentang tindak pidana, Tindakan penyidikan meliputi pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan barang bukti, penggeledaan serta pemanggilan dan pemeriksaan tersangka dengan melakukan penangkapan dan penahanan.

Dalam melakukan penyidikan anak, diusahakan dan dilaksanakan oleh polisi wanita dalam beberapa hal, jika dipandang perlu dapat dilaksanakan dengan bantuan polisi pria. Penangkapan tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Oleh karena hal itu, maka yang digunakan sebagai dasar dalam penangkapan Anak adalah Pasal 16 KUHP yang menyatakan bahwa tujuan penangkapan tersangka adalah untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan. Sedangkan dalam pasal 17 KUHP, ditegaskan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang telah diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup.

Anak harus dipahami sebagai seorang yang belum mampu memahami masalah hukum yang terjadi atas dirinya. Dalam melakukan tindakan penangkapan, asas praduga tak bersalah harus

dihormati dan dijunjung tinggi sesuai dengan harkat dan martabat anak. Menangkap anak yang melakukan kenakalan, harus didasarkan pada bukti yang cukup dan jangka waktu yang terbatas.

Jangka waktu penahanan untuk kepentingan penyidikan paling lama adalah 20 (dua puluh) hari. Apabila untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) hari. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, Penyidik harus sudah menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Jangka waktu penahanan anak lebih singkat daripada penahanan orang dewasa.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pada prinsipnya menghendaki agar setiap Kejaksaan Negeri memiliki Penuntut umum Anak (sesuai dengan Penuntut Umum yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 6) untuk menangani anak. Tetapi apabila Kejaksaan Negeri tidak mempunyai Penuntut Umum anak karena belum ada yang memenuhi syarat yang ditentukan atau karena mutasi/pindah, maka tugas penuntutan perkara Anak dibebankan kepada Penuntut Umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, selain dengan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997.

“Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, tugas penuntut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibebankan kepada Penuntut Umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa”

Hal tersebut apabila ditinjau dari aspek perlindungan anak, maka dapat dikatakan bahwa anak tidak mendapatkan perlindungan. Apabila penuntutan anak tidak dilakukan oleh Penuntut Umum Anak, dikhawatirkan sasaran perlindungan anak menjadi diabaikan karena Penuntut

Umum yang bersangkutan tidak memahami masalah anak, sehingga tindakan hukum yang dilakukan dalam penuntutan mempunyai kemungkinan tidak mencerminkan prinsip-prinsip perlindungan anak.

Penuntut Umum Anak dalam melakukan tugasnya yaitu meneliti berita acara yang diajukan oleh penyidik, jika dianggap perlu serta dengan persetujuan Hakim anak, tidak perlu mengajukan anak ke pengadilan. Anak cukup dikembalikan kepada orang tuanya dengan teguran dan nasihat. Orang tua/wali/orang tua asuh anak perlu diberi peringatan dan nasihat.

Atas ijin Hakim anak, Penuntut Umum Anak dapat meminta bantuan dari para ahli atau membentuk tim sendiri. Petugas sosial seperti dari Balai Pemasarakatan serta orang tua/wali/orang tua asuh anak juga dilibatkan dalam menangani dan membina anak. Hal tersebut dilakukan atas pertimbangan bahwa anak membutuhkan perhatian, cinta kasih, asuhan, perlindungan, pembinaan, pendidikan serta rasa aman dan tenteram baik secara rohani maupun jasmani.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 58 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pada waktu pemeriksaan saksi, Hakim dapat memerintahkan agar terdakwa dibawa keluar ruang sidang. Tetapi orang tua/wali/orang tua asuh, Penasihat Hukum dan Pembimbing kemasyarakatan, untuk tetap hadir didalam persidangan.

Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari adanya hal yang dapat mempengaruhi jiwa anak. Hakim harus cermat dan teliti terhadap keadaan terdakwa, untuk dapat menentukan anak harus keluar ruang sidang pengadilan atau tidak pada saat pemeriksaan saksi. Jika diperkirakan keterangan saksi dapat mempengaruhi jiwa anak, maka anak yang bersangkutan harus dikeluarkan dari persidangan dalam rangka perlindungan anak.

Setelah pemeriksaan saksi, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa. Dalam melakukan pemeriksaan. Hakim dan petugas lainnya tidak memakai pakaian seragam dengan tujuan untuk menghilangkan rasa takut dalam diri anak.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam pasal 59 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka sebelum mengambil keputusan, Hakim memberi kesempatan kepada orang tua/wali/orang tua asuh untuk mengemukakan segala hal yang bermanfaat bagi anak.

Dalam pasal 24 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, diatur mengenai tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak yang meliputi: mengembalikan kepada orang tua/wali/orang tua asuh, menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dalam latihan kerja, atau menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan latihan kerja, atau menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Selama proses peradilan, hak-hak anak harus dilindungi, yang meliputi asas praduga tak bersalah, hak untuk memahami dakwaan, hak untuk diam, hak untuk menghadirkan orang tua/wali/orang tua asuh, hak untuk berhadapan dan menguji silang kesaksian atas dirinya dan hak untuk banding.

Dalam pasal angka 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, terdapat batasan pengertian mengenai Anak Didik Pemasarakatan yaitu:

Anak Pidana: anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Anak Pidana berhak: 1) Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya; 2) Mendapatkan

perawatan, baik perawatan rohani dan perawatan jasmani; 3) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran; 4) Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; 5) Menyampaikan keluhan; 6) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media lainnya yang tidak dilarang; 7) Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya; 8) Mendapatkan pengurangan masa pidana/remisi; 9) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; 10) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diantara hak-hak anak pidana sebagaimana tersebut di atas, pelaksanaanya hak untuk mendapatkan pengurangan masa pidana/remisi, mendapat kebebasan bersyarat dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tentunya bukan masalah. Pertanyaannya adalah bagaimana pelaksanaan hak-hak yang lain? Padahal hak-hak tersebut sangat dibutuhkan oleh anak dalam rangka menyentuh langsung terhadap perkembangan psikologis anak.

Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan

Perlindungan hukum, bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Cakupan pengertian perlindungan anak kiranya sejalan dengan konvensi hak anak dan perlindungan HAM yang terpatris dalam Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Pasal 22 B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menegaskan: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Dasar Negara RI Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi hak-hak anak: 1) Nondiskriminasi; 2) Kepentingan yang terbaik bagi anak; 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan; 4) Penghargaan terhadap pendapat anak.

Sebagaimana dengan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), perlindungan hukum khusus dilaksanakan melalui (Pasal 64 ayat (2): 1) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak; 2) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini; 3) Penyediaan sarana dan prasarana khusus; 4) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak; 5) Pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum; 6) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga dan; 7) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi. (Waluyo, 2000)

Perlindungan meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis (pasal 15). Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (pasal 16 ayat (1). Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum ayat (20. Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir ayat (3).

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan: 1) Anak dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Anak antara lain: Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana; Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas tahun), tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana; Anak yang Menjadi korban Tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan /atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana; Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri.

Pada sistem peradilan pidana anak dalam Undang-Undang yang baru terdapat istilah Keadilan Restoratif hal ini tertuang dalam pasal 1 Angka 6 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Demi mewujudkan keadilan restoratif, maka dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dimungkinkan adanya diversi. Diversi diperjelas di pasal 1 angka 7 UU Nomor 11 Tahun 2012 adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses Peradilan pidana ke Proses di luar peradilan Pidana.

Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak Yang Dianalisis Dari Perlindungan Terhadap Anak.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan baik bagi korban maupun bagi terdakwa. Untuk menentukan bahwa terdakwa terbukti bersalah atau tidak, hakim harus berpedoman pada sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP sebagai berikut:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Pertimbangan Yuridis, aspek-aspek pertimbangan Yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan konteks penting dalam putusan hakim. Hakekatnya pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan. Oleh jaksa/penuntut umum. Dapat dikatakan lebih jauh bahwasanya pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar/dictum putusan Hakim.

Pertimbangan Non Yuridis (Laporan Pembimbing Kemasyarakatan), dalam proses persidangan, anak sebagai pelaku tindak pidana Hakim juga harus mempertimbangkan laporan Pembimbing Kemasyarakatan. Laporan Pembimbing Kemasyarakatan hanya digunakan dalam proses persidangan yang menempatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Laporan ini berguna bagi Hakim guna mengenal lebih dalam pribadi anak sehingga hasil putusannya akan lebih terarah serta sesuai dengan kebutuhan anak.

Analisis kasus yang terjadi, yaitu anak sebagai individu yang belum dewasa perlu mendapatkan perlindungan hukum (*legal protection*) agar terjamin kepentingannya sebagai anggota masyarakat. Masalah penegakan hak-hak anak dan hukum anak, pada dasarnya sama dengan masalah penegakan hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, masalah pengimplementasian hukum anak harus benar-benar terjaga dan dilaksanakan dengan sebaik mungkin, pada hakekatnya prinsip dasar dan tata cara persidangan perkara anak dalam praktik di Pengadilan Negeri Medan mengacu pada ketentuan Pasal 55 Pasal 59 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, ketentuan-ketentuan KUHP, pedoman pelaksanaan KUHP, dan peraturan-peraturan lainnya.

Dalam putusan pidana No.2/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mdn.terdakwa dan korban sama-sama masih dalam kategori anak dibawah umur, dimana terdakwa baru berumur 16 tahun dan korban dan korban baru berumur 16 tahun hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, menyebutkan: “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) ta hun dan belum pernah kawin.” Kemudian dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Analisa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut dalam perspektif perlindungan anak, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa sebagai anak nakal yang melakukan tindak pidana sebagaimana putusan No.2/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mdn ditemukan fakta

hukum bahwa dalam perkara terdakwa, Hakim dalam mengambil keputusan lebih terfokus pada hasil pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Hakim berdasarkan kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara terdakwa, hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana.

Sebelum memberi keputusan hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Dalam perkara terdakwa hal-hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa dapat merusak masa depan korban.

Sedangkan hal-hal yang meringankan adalah: 1) Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya. 2) Terdakwa masih anak-anak yang membutuhkan perhatian orang tuanya dan masih mempunyai masa depan. 3) Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan. 4) Terdakwa masih berusia muda yang masih dapat dibina. 5) Terdakwa belum pernah dihukum.

Dalam pokok pertimbangan hukumnya hakim menyebutkan: terhadap terdakwa yang masih merupakan anak dibawah umur yang sedang bermasalah dengan hukum, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor: 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka terhadap anak dapat dilakukan perlindungan dan penempatan dalam Rumah Tahanan Anak.

Padahal dalam seluruh pertimbangan hukumnya, hakim harus melihat pulaberbagai aspek dalam hukum pidana, yaitu: dengan bertitik tolak kepada aspek yuridis, aspek keadilan bagi terdakwa dan kultur masyarakat pada umumnya, aspek kejiwaan dan atau psikologis terdakwa, aspek agamis dan atau religius, dimana terdakwa tinggal dan dibesarkan, maka uraian sebagaimana konteks di atas haruslah mempertimbangkan aspek dan dimensi Legal justice, *Moral Justice* dan *Social*

Justice atau lebih tegasnya lagi putusan dan pertimbangan dari hakim harus mempertimbangkan dimensi teoretis, Normatif dan praktik antara *das sollendengan das sein*.

SIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap anak dapat kita lihat dari tahap penyidikan,tahap penuntutan,tahap persidangan dan tahap pemasyrakatan, dalam hal ini dalam perlindungann hukum terhadap anak masih ada tidak begitu maksimal dimana dalam penyidikan Perlindungan hukum terhadap anak telah tercermin dalam ketentuan Pasal 42 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui perlakuan secara manusiawi sesuai dengan hak-hak anak,

Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencabulan oleh anak, menurut hemat penulis sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 183 KUHP berupa 3 alat bukti yakni keterangan saksi , keterangan terdakwa dan petunjuk sehingga Hakim memperoleh keyakinan bahwa Muhammad Lufti sebagai pelaku pencabulan tersebut. Selain itu, terdapat beberapa pertimbangan hukum yang menyangkut berat ringannya pidana (*strafmaat*) menurut penulis hal yang meringankan terdakwa antara lain sopan dipersidangan , dan berterus terang dalam persidangan dan mengingat dan mempertimbangkan Pasal 81 ayat (2) UU.No.23 Tahun 2002 jo UU Pasal 24 ayat (1) huruf a UU.No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak serta peraturan Perundangan lain yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshari, T. (2005). *Metologi Penelitian Hukum, Penulisan Skripsi*, Pustaka Bangsa: Press Medan.
- Apong, H. (1998) *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Buku Saku untuk Polisi, Unicef: Jakarta.
- Gultom, M. (2006). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: Refika
- Gultom, M. (2008).. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama: Bandung.
- Hadjon, P.M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat indonesia*, Bina Ilmu: Surabaya.
- Hamzah, A. (1984). *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV Artha Jaya: Jakarta.
- Harahap, M.Y. (1997). *Beberapa Tinjauan tentang Permasalahan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Ilyas, A. (2012). *Asas-asas Hukum Pidana*, Renggang Education: Yogyakarta.
- Ishaq, (2009). *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Kansil, CST. (1989). *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum indonesia*.
- Marzuki, P.M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana: Jakarta.
- Nusantara, A.H.G. (1986). *Hukum dan Hak-Hak Anak*, disunting oleh Mulyana W. Kusumah, Rajawali: Jakarta.
- Poernomo, B, (1985). *Asas-asa Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Pramukti, A.S. & Primaharsya, F. (2015). *Sistem Peradilan Anak*, Pustaka Yustisia: Yogyakarta.
- Rahardjo, S. (1993). *Penyelenggaraan keadilan dalam masyarakat yang sedang berubah. Jurnal masalah hukum*.
- Setiono, (2004). *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret: Surakarta.
- Siregar, M. (2007). *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA): Jakarta.
- Soesilo, R. (1988). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia: Bogor.
- Sugiyono, (2002). *Metode Penelitian Ilmu Administrasi*, Alfabeta: Jakarta
- Syamsuddin, A. (2011). *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak)
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pidana
- Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Waluyo, B, (2011). *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Sinar Grafika: Jakarta.